

BAB III

PERAN APTI DALAM MEMERJUANGKAN KEPENTINGAN PETANI TEBAKAU DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, dan beberapa media masa dan *online*, akan dipaparkan temuan-temuan tersebut secara deskriptif dalam bab ini, hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan merefleksikan ke teori-teori yang ada baik dalam kerangka teori maupun teori-teori lain yang berkaitan dengan permasalahan di lapangan, dan perumusan masalah yang dijadikan landasan penelitian.

Secara lebih fokus, peneliti akan mencoba memaparkan analisis membahas hasil penelitian dengan menjawab perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian, wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, banyak fakta mengenai kondisi di lapangan yang jika ditela secara teori akan menemukan kesesuaian. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa APTI Temanggung sebagai kelompok kepentingan yang fokus pada pemberdayaan petani tembakau di Kabupaten Temanggung mampu memberikan pengaruh positif bagi petani tembakau di Temanggung pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3.1 Tembakau sebagai produk unggulan di Kabupaten Temanggung

Secara geografis, Kabupaten Temanggung dikelilingi oleh tiga gunung, yaitu Sindoro, Sumbing dan Perahu, Kondisi alam dan geografis tersebut memang sangat cocok sebagai area penanaman tanaman tembakau. Dengan kondisi seperti tersebut maka penanaman tembakau merupakan salah satu komoditas perkebunan terbaik yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung. Budidaya tembakau tersebar di 14 sentra wilayah tembakau dan merupakan salah satu pilar penting bagi perekonomian daerah bagi Kabupaten Temanggung.

Nilai ekonomi yang tinggi menjadikan daya tarik bagi sebagian besar masyarakat Temanggung untuk menjadi petani tembakau. Nilai jual yang tinggi dan pembeli yang pasti membuat banyak orang di Kabupaten Temanggung memilih untuk menjadi petani tembakau. Kebanyakan petani tembakau di Kabupaten Temanggung memang menjadi petani tembakau karena sudah merupakan pekerjaan turun-temurun dari orang tua mereka. Oleh karena itu, menjadi petani tembakau dapat dikatakan telah menjadi budaya bagi sebagian besar masyarakat Temanggung. Tembakau secara langsung dijadikan sebagai sumber penghidupan bagi dirinya dan keluarga. Temanggung juga menghasilkan tembakau pilihan, yang disebut dengan tembakau srintil, yang nilai ekonominya bisa mencapai Rp 1 juta per kilogram.

Keberadaan tembakau di Kabupaten Temanggung dari tahun ketahun mengalami peningkatan dilihat dari sisi luas dan produksi panennya, hanya

pada tahun 2014 jumlahlah sedikit menurut dikarenakan dengan kondisi cuaca yang tak menentu, seperti yang terlihat dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1.
Jumlah Luas dan Produksi Tembakau dari tahun ke tahun

| Tahun | Luas (Ha) | Produksi (Ton) |
|--------------|------------------|-------------------------|
| 2015 | 18.248 | 10.611 |
| 2014 | 12.587 | 6.922 |
| 2013 | 14.517 | 7.146 |
| 2012 | 15.587 | 9.978 |
| 2011 | 14.244 | 9.126 |

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung, 2016

Kontribusi tembakau tak hanya terlihat dari segi produksi. Sektor-sektor lain juga banyak yang terpengaruh sebagai akibat adanya budidaya tembakau. Sektor-sektor yang terpengaruh selain petani tembakau antara lain sektor pedagang alat-alat perlengkapan jual beli tembakau, sektor transportasi, sektor tenaga kerja, sektor industri hasil tembakau,

Melihat hal-hal tersebut, tak mengherankan bahwa komoditas tembakau memberikan *multiplayer effect* yang besar bagi hampir semua lapisan masyarakat. Pemasukan dari sektor pajak pun meningkat dengan adanya penjualan-produk-produk tembakau. Pemasukan ini berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari penjualan produk-produk tembakau, Pajak Reklame dari promosi-promosi produk, dan yang paling terlihat adalah masuknya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi Kabupaten Temanggung.

Tembakau Temanggung juga dapat dikatakan sebagai salah satu tembakau dengan mutu terbaik. Tembakau Temanggung berfungsi sebagai pemberi rasa dan aroma pada pembuatan rokok. Komposisi tembakau Temanggung dalam racikan rokok kretek berkisar antara 12-24% sedangkan sisanya adalah tembakau lain yang digunakan sebagai campuran.

Harga jual komoditas tembakau juga dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan komoditas pertanian atau perkebunan yang lain. Bahkan ketika diakumulasi dari seluruh sektor yang terkait, peredaran uang yang ada di Temanggung ketika musim tembakau tiba selama 2-3 bulan musim tembakau dapat mencapai 1 trilyun rupiah.

3.2 Perjuangan APTI Temanggung dalam Usaha Peningkatan Kesejahteraan Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung

Menilik kembali ke tujuan awal bahwa didirikannya APTI Temanggung adalah sebagai reaksi adanya peraturan pemerintah yang dirasa memberatkan petani tembakau di Temanggung. Peraturan yang membatasi kadar TAR dan nikotin dalam rokok ini dianggap tidak relevan jika diterapkan di Temanggung mengingat kadar TAR dan nikotin tembakau Temanggung yang sangat tinggi. Munculnya APTI Temanggung sebagai salah satu kelompok masyarakat yang peduli dengan petani tembakau menjadikan petani merasa mempunyai “rumah perlindungan” ketika petani tembakau dihadapkan pada peraturan atau kendala yang memberatkan dan mengganggu eksistensi mereka.

Dengan begitu besarnya efek yang ditimbulkan dari tembakau, diperlukan pengawasan dan dukungan dari semua pihak yang ada di Temanggung untuk tetap mempertahankan eksistensi pertembakuan Temanggung. Seperti dalam wawancara dengan sekretaris umum APTI Temanggung Bapak Noer Ahsan, beliau berujar :

“... Tujuan awal didirikannya APTI Temanggung berupaya menjadi sebuah kelompok masyarakat yang selalu untuk memperjuangkan kepentingan petani tembakau di Kabupaten Temanggung...”¹

Dalam sebuah kelompok yang mengutamakan kepentingan anggota (*interest group*) seperti APTI Temanggung, akan terdapat suatu bentuk kekuatan yang mempunyai daya dukung dari orang-orang yang ada di dalamnya yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan APTI Temanggung di sini adalah mencapai dan meningkatkan kesejahteraan petani tembakau yang ada di Kabupaten Temanggung dan melindungi dari serangan-serangan –dalam bentuk apapun- yang menyerang petani tembakau.

Kelompok kepentingan (*interest group*) ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan.² Dalam APTI Temanggung, individu-individu di dalamnya memiliki kesamaan sikap untuk selalu berusaha mempertahankan dan melindungi tembakau

¹ Wawancara dengan Noer Ahsan, Sekretaris APTI Temanggung, , 22 Maret 2017 pukul 11.45 WIB di Desa Losari Temanggung.

² Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, hlm. 109

sebagai komoditas terbaik dan unggulan di Kabupaten Temanggung. Pada dasarnya ada enam substansi pemahaman konsep kelompok kepentingan yang dapat diambil yaitu:(Fathurahman dan Sobri, 2002)³

1. Setiap kelompok kepentingan merupakan sekumpulan orang yang mengorganisasikan dirinya atas nama satu orang atau lebih kepentingan tertentu yang diperjuangkan.
2. Adanya kepentingan yang sama, menyatukan sekelompok orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama tertentu.
3. Setiap aktivitas kelompok kepentingan selalu bergandengan dengan isu publik yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
4. Setiap aktivitas yang dilakukan kelompok kepentingan, akan mengatasnamakan masyarakat, mengingat fungsinya sebagai artikulator (mengartikulasi) atau pemilah-pemilah kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, dan mengubahnya menjadi tuntutan yang akan ditujukan kepada pemerintah.
5. Aktivitas kelompok kepentingan tidak ditujukan untuk memperoleh jabatan publik, tetapi lebih pada upaya partisipasi politik atau berusaha mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah.
6. Adanya berbagai variasi atau tipe kelompok kepentingan artinya tidak memiliki bentuk tunggal, tergantung dari perbedaan karakteristik keorganisasian dari kelompok kepentingan.

³ Budi Suryadi, 2006, *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: IRCiSoD, hlm. 47-48

Berdasarkan enam substansi di atas, pada tiap poinnya keberadaan APTI Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. APTI Temanggung didirikan untuk melindungi dan mengakomodir kepentingan dan kebutuhan petani tembakau sehingga dapat mempertahankan eksistensinya dalam pemenuhan kebutuhan pertembakauan.
2. Orang-orang yang berada di dalam APTI Temanggung adalah orang-orang yang berusaha untuk selalu peduli dengan apa yang sedang dialami oleh petani tembakau supaya para petani perlindungan.
3. Program-program APTI Temanggung dilakukan untuk mengembangkan petani tembakau dan untuk menunjukkan kepada pihak-pihak lain termasuk pemerintah mengenai keberadaan mereka dan menuntut perlakuan perlindungan yang sama sebagai warga negara.
4. Salah satu cara APTI Temanggung untuk mengemukakan suaranya adalah dengan melakukan demonstrasi. Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk reaksi petani tembakau untuk menolak suatu bentuk rancangan atau undang-undang peraturan pemerintah yang tidak mengakomodir kepentingan petani dan akan “membunuh” petani tembakau. Untuk saat ini APTI Temanggung fokus untuk mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Pertembakauan
5. Aktivitas yang dilakukan APTI Temanggung semata-mata dilakukan untuk perlindungan dan penguatan petani tembakau, bukan untuk tujuan-tujuan politis ataupun tujuan lain. APTI Temanggung berupaya untuk

selalu memberikan informasi bagi petani tembakau mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petani tembakau.

6. APTI Temanggung mempunyai fokus khusus kepada petani tembakau sehingga semua program dilakukan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan petani tembakau.

APTI Temanggung juga mengajarkan semua petani tembakau anggotanya untuk dapat mengembangkan dirinya untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pengembangan diri petani ini tidak hanya sekedar pada pengembangan pola pikir tetapi juga pada pengembangan pola budaya petani tembakau. Proses ini juga dapat dikelompokkan ke dalam suatu langkah pemberdayaan manusia dalam pembangunan. Dalam proses pembangunan petani tembakau ini memang harus disertai dengan kesadaran kritis dari petani tembakau itu sendiri untuk dapat, mampu, dan mau memajukan dirinya. Kesadaran kritis ini kelak akan sangat diperlukan petani tembakau sebagai salah satu jalan melihat dan mengukur kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya.

3. 2.1 Bentuk dan cara Perjuangan APTI Temanggung dalam merespon RUU Pertembakauan

Kelompok kepentingan mengumpulkan dan mengubah kepentingan-kepentingan yang tercerai berai di masyarakat menjadi satu kesatuan untuk kemudian di perjuangkan, agar menjadi bagian dari

kebijakan publik yang memberi manfaat bagi kelompoknya, dan kepentingan masyarakat yang di perjuangkan.

Ada banyak hal yang dilakukan oleh kelompok kepentingan untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah yaitu:

- Demokrasi dan tindakan kekerasan. Hal ini mejadi sarana untuk menyatukan tuntutan yang bisa di pakai oleh setiap kelompok kepentingan.
- Hubungan pribadi. Dengan menggunakan keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan menjadi perantara
- Perwakilan langsung. Melakukan representasi atau komunikasi langsung dengan orang yang berkepentingan
- Saluran formal dan institusional lain. Misalnya melalui media massa seperti radio, surat kabar, televisi, dan majalah. Atau bisa juga melalui parpol, partai yang sangat ideologis dengan struktur organisasi yang hirakis seperti partai komunis cenderung mengendalikan kelompok kepentingan ini.⁴

Senada dengan apa yang diungkapkan diatas apa yang dilakukan APTI Temanggung sebagai salah satu kelompok kepentingan yang selalu ingin mempertahankan keberadaan petani tembakau dan komoditas tembakau terutama di Temanggung, berusaha melalui berbagai macam cara untuk mendesak pemerintah supaya RRU pertembakauan segera di sahkan

⁴ Cheppy Haricahyono, 1991, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 201

menjadi UU. Berikut ada 3 cara (aksi) terakhir yang dilakukan APTI Temanggung adalah:

1. Ratusan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada tanggal 16 November 2016 bertolak menuju Jakarta untuk beraudensi dengan ketua DPR RI.
2. Ratusan petani tembakau dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berbagai daerah di Jawa Tengah, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Senin (9/1/2017).
3. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Temanggung mengadakan doa bersama dan pemasangan baliho berisi tuntutan petani tembakau yang dilaksanakan Jumat (17/3/2017) di sekitar jembatan Kranggan, kabupaten Temanggung.

Dalam aksi pertama pada tanggal 16 November 2016 para petani tembakau menuju Jakarta. Tujuan dari kedatangan para petani tembakau di Jakarta, antara lain meminta segera pengesahan RUU Pertembakauan, menolak impor tembakau, dan menolak modal asing untuk industri tembakau. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat APTI, Agus Parmuji, dia mengatakan selain petani dari Temanggung turut juga perwakilan petani dari beberapa kabupaten di Jawa Tengah, serta perwakilan dari sembilan provinsi lain. Total sekitar 600 orang yang berkumpul di Senayan. Mereka datang tidak untuk melawan, berperang atau dalam rangka pemberontakan. Mereka hanya ingin mengadakan nasib serta

berdiskusi bersama mencari solusi atas nama para petani tembakau. Tujuan ke DPR RI ini bukan tanpa alasan mengingat mereka merupakan wakil rakyat yang wajib mendengar, mencermati, sekaligus mencarikan jalan keluar bagi masyarakat, dalam hal ini masa depan jutaan petani dari berbagai daerah yang bergantung pada komoditas tembakau. Kedatangan mereka juga tidak terlepas dari usaha pelayangan aduan melalui surat sebanyak dua kali yang mentah dan tidak kunjung mendapat tanggapan. Nasib mereka berada di wakil rakyat yang duduk di Senayan untuk memberikan payung hukum pasti dan menyelamatkan tembakau lokal dari campur tangan berbagai pihak yang mereka anggap berpotensi merugikan. Nur Ahsan mengatakan tujuan silaturahmi ini agar DPR RI segera merealisasikan RUU Tembakau masuk dalam pembahasan pokok, karena sampai saat ini belum ada semangat. Silaturahmi kami ke DPR RI sekaligus memberikan dukungan pada para wakil rakyat untuk segera membahas RUU Tembakau, karena ini benar-benar untuk kepentingan para petani. Mereka tidak ada afiliasi yang ditunggangi kepentingan partai maupun kepentingan pabrikan.. Ia mengatakan kalau ditunggangi, posisi petani sekarang berlawanan dengan pabrikan maunya tembakau dibeli semua ternyata pada masa panen kali ini tidak semua dibeli pabrikan. Hal ini membuktikan bahwa silaturahmi ke DPR ini benar-benar untuk RUU Pertembakauan supaya direalisasikan agar petani tembakau Indonesia mendapat perlindungan hukum sehingga nantinya posisi petani memiliki daya saing terhadap pabrikan maupun industri rokok di dalam negeri.

Dalam aksi yang kedua pada tanggal 9 Januari 2017 di Kantor Gubernur Jawa Tengah Mereka menuntut pemerintah menghapus kebijakan impor tembakau dari luar negeri. Mereka berasal dari Kabupaten Klaten, Boyolali, Demak, Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Mereka berangkat dari daerah masing-masing menaiki bus yang berjumlah 12 armada. Dalam aksinya, mereka melakukan orasi serta membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan dan penolakan kebijakan pemerintah melakukan impor tembakau. Selain itu, juga mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Pertembakauan. Koordinator aksi, Ariyanto Sigit mengatakan, aksi para petani tembakau ini dilatarbelakangi keresahan petani, karena DPR RI tak segera mengesahkan RUU. Hal ini membuat nasib petani dirasa terkatung-katung karena pemerintah masih terus melakukan impor tembakau. Dana cukai Rp170 trilyun, tapi ironis kebijakan pemerintah sangat merugikan petani tembakau dalam negeri. Maka tuntutan kami menolak impor tembakau. Ketua APTI Jateng, Wisnu Brata menambahkan, selain mendesak pembatasan hingga penghentian impor tembakau, Petani juga mendesak agar Presiden Joko Widodo juga bisa segera mendorong DPR untuk mengesahkan RUU Pertembakauan yang saat ini draftnya sudah ada di meja DPR. Jika RUU itu disahkan, maka sejumlah kebijakan yang berpihak para petani akan dapat langsung dirasakan. Utamanya menyangkut pengendalian kuota impor tembakau yang kini mencapai 65 persen. Pemerintah harus memproteksi ini. Maka kami minta gubernur Ganjar agar menyampaikan ke pak Presiden. Produk kami sudah mencukupi kebutuhan tembakau Indonesia. Wisnu mengaku APTI Jateng juga akan menggelar aksi serupa dengan mengerahkan 10.000 petani pada Aksi 17

Januari 2017 mendatang. Kita akan pastikan bahwa aspirasi kami didengar. Ini semata agar pemerintah tahu bahwa kebijakan impor tembakau telah memiskinkan para petani. Di tengah aksi, masa juga menampilkan kesenian tradisional berupa angklung. Setelah beberapa saat melakukan orasi, perwakilan masa ditemui oleh perwakilan pemerintah Provinsi Jateng, yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Heru Setiadie dan dinas terkait.

Selanjutnya aksi terbaru mereka pada tanggal 17 Maret 2017 di Kranggan Temanggung, Para Petani bersama APTI Temanggung mendesak DPR – Pemerintah agar dapat menetapkan RUU Pertembakauan agar memiliki payung hukum. Sekretaris DPC APTI Temanggung Nor Ahsan mengemukakan, petani tembakau Temanggung siap mengadakan perlawanan yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak didengar. Mengacu kepada pemberitaan media saat ini yang simpang siur tentang keberadaan RUU Pertembakauan. Noer Ahsan, yang juga selaku koordinator aksi menegaskan, sikap Pemerintah sangat dinantikan oleh para petani tembakau. Dimana saat ini petani sangat mendambakan adanya kedaulatan, petani harus lepas dari keterpurukan, petani tembakau tidak boleh sengsara, itu semua bisa terjadi jika ada regulasi yang berpihak pada petani tembakau. Aksi ini merupakan kesepakatan musyawarah semua pengurus APTI seluruh Indonesia yang rencananya akan diikuti oleh daerah -daerah lainnya. Jika aksi ini tidak di dengar, maka akan menyusul aksi yang besar di Jakarta nantinya. DPC APTI Temanggung dan seluruh anggota memiliki hak untuk hidup sejahtera. Oleh karenanya dalam keterangannya persnya, sekretaris APTI Temanggung agar

petani tembakau tetap solid dalam memperjuangkan RUU pertembakauan dan perjuangan tentang pengendalian import tembakau dari Luar Negeri, mengingat potensi kita masih besar. Noer Ahsan pada kesempatan ini mengungkapkan, APTI meminta maaf kepada pengguna jalan dikarenakan petani tembakau sedang menyampaikan aspirasi menuntut disahkannya RUU Pertembakauan dan menolak import tembakau. Mengingat pemasangan baliho di dekat jembatan kali progo sedikit menghambat laju kendaraan yang sedang melintas. Tuntutan petani tembakau tersebut diantaranya adalah : Petani tembakau menuntut kedaulatan dan kesejahteraan, Petani tembakau perlu payung hukum yang jelas, Petani tembakau butuh peraturan perundangan yang adil dan berimbang, mendesak RUU Pertembakauan segera disahkan dan diimplementasikan di Indonesia. Alasan mengapa import tembakau luar negeri harus ditolak diantaranya adalah melindungi produksi tembakau dalam negeri, agar terjadi penyerapan tembakau lokal yang di produksi petani tembakau Indonesia. Mencegah komoditas penting berada di tangan negara lain, utamanya melindungi varietas asli Indonesia, mengingat tembakau khas Indonesia sudah di budidayakan di Luar Negeri. Potensi Indonesia masih sangat mampu untuk memproduksi tembakau sendiri, baik dari sisi lahan maupun SDM. Ketua PAC Temanggung yang juga Kepala Desa Nampirejo ini menjelaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap petani tembakau harus jelas. APTI dalam percaturan pertembakauan diharapkan mampu membawa terwujudnya kesejahteraan petani tembakau, terutama perjuangan tentang regulasi atau aturan terkait import tembakau dari luar negeri. Keresahan petani tembakau tentang membanjirnya impor tembakau dari beberapa negara,

seperti Cina, AS, Simbabwe, Turki dan India yang membanjiri pasar Indonesia. Hal ini mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap pasakon tembakau di Indonesia, tentunya sangat berpengaruh terhadap harga jual tembakau lokal. Oleh karenanya menegaskan hal ini harus dikaji dan diberikan solusi oleh Pemerintah. Data Kementerian Perindustrian RI menyebutkan bahwa tahun 2003 Jumlah import tembakau hanya 28 ribu ton, Tahun 2010 sebanyak 91 ribu ton dan pada puncaknya pada tahun 2012 mencapai 150.1 ribu ton. Ini menyebabkan harga tembakau lokal rata-rata rendah di tahun 2015.

Ketiga wujud aksi yang di lakukan oleh APTI temanggung dilakukan secara tertib tanpa anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Petani melakukan “perlawanan” bukan semata untuk merebut kembali hak hak hidup mereka sebagai wujud dari perjuangan politik untuk kesejahteraan para petani tembakau di Kabupaten Temanggung. Tetapi tanpa disadari, tuntutan mereka untuk memperoleh keadilan dalam kebijakan publik itu dapat berkembang menjadi lebih luas yaitu untuk memperjuangkan secara lebih substansial pelaksanaan demokrasi. Perjuangan untuk mewujudkan keadilan dalam kebijakan publik ini juga memiliki arti mengingatkan pemerintah untuk taat mewujudkan mandate konstitusi dalam menempatkan rakyat sebagai “raja”. Dalam konstelasi perlawanan petani yang disertai semangat dan pantang menyerah seperti ini, petani tak layak diabaikan, dan tak layak diposisikan sebagai pihak yang kalah. Dengan kata lain , suara petani yang menyuarakan suara politis tersebut, layak didengar , layak dipertimbangkan dan di beri tempat.

Kiranya akan menjadi kesalahan besar bila da anggapan yang menyebutkan bahwa petani tembakau Temanggung itu sedang melakukan pembangkangan. Mereka melawan dengan tujuan semata hendak menegaskan bahwa mereka menuntut aspirasi mereka didengarkan dan menjadi pertimbangan dalam susatu pengambilan kebijakan yang demokratis. Kebijakan yang mengatur kehidupan petani tembakau ini hendaknya secara terbuka melibatkan mereka dalam seluruh proses perencanaan dari tahap paling awal hingga akhir.

Petani Tembakau Temanggng yang tergabung dalam APTI Temanggung menyusun suatu gerakan perlawanan dengan baik menggunakan kertrampilan mengorganisasikan perlawanan yang secara efektif, kepemimpinan yang ditaati, didukung sikap gigih dan militant yang penuh semangat. Dukungan organisasi, kekuatan jaringan dan kepemimpinan tadi membuat perlawanan mereka penuh semngat dan pantang menyerah, Karena dalam perlawanan itu mereka bersenjatakan kebenaran.

APTI sebagai asosiasi petani mendesak agar RUU Pertembakauan segera disahkan, karena dalam RUU itu perlindungan budidaya tembakau kepada petani diatur jelas dalam

Pasal 10 RUU Pertembakauan mengenai Budidaya Tembakau

'...Budidaya tembakau wajib dilaksanakan dengan ketentuan: kaidah budidaya tembakau mengacu pada produktivitas, mutu, efisiensi, dan kelangsungan usaha tani; menjaga dan melindungi kekayaan hayati tembakau asli daerah, proporsional antara budidaya varietas lokal dan varietas unggulan; dan menjaga keaslian tembakau dalam proses tanam maupun pasca panen...'

Pasal di atas secara jelas menyatakan dalam upaya budidaya tembakau harus mempertimbangkan produktivitas, mutu ,efisiensi dan yang paling penting menjaga kelangsungan usaha tani, supaya para petani mampu bersaing dalam industri pertembakauan dalam negeri.

Pasal 3 RUU Pertembakauan mengenai Pengelolaan Tembakau

“... Pengelolaan pertembakauan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan budidaya dan produksi tembakau ;*
- b. Mengembangkan industri pertembakauan bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan negara ;*
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;*
- d. Melindungi petani tembakau dan pekerja pertembakauan ; dan*
- e. Melindungi kesehatan masyarakat ...”*

Isi dari pasal itu sesuai dengan tuntutan petani tembakau, yaitu diantara adalah sebagai berikut

1. Petani tembakau menuntut kedaulatan dan kesejahteraan
2. Petani tembakau perlu payung hukum yang jelas
3. Petani tembakau butuh peraturan perundangan yang adil dan berimbang.

Hal ini senada dengan aspirasi para petani tembakau Temanggung, seperti dalam wawancara dengan Bapak Wagiyono, salah seorang petani Tembakau di Desa Losari berikut ini

“... Pengehnan petani itu sederhana kok , kami cuma pengen dapat perlindungan dari pemerintah dan pemerintah lebih perhatian ke kita para petani supaya petani disini bias lebih sejahtera...”⁵

Di satu sisi memang tidak bisa dipungkiri permasalahan dalam tembakau ini mengandung kecaman keras dari sisi praktisi kesehatan, dalam RUU ini juga disebutkan pelaku usaha harus mencantumkan peringatan kesehatan pada setiap iklan. Seperti dalam

⁵ Wawancara dengan Wagiyono, Petani Tembakau, , 22 Maret 2017 pukul 13.05 WIB di Desa Losari Temanggung.

Pasal 50 ayat (1) RUU Pertembakauan

“... Pelaku usaha wajib mencantumkan peringatan kesehatan pada setiap iklan dan promosi baik di media elektronik, media cetak, dan media luar ruang...”

3.2.2 Efektivitas perjuangan APTI Kabupaten Temanggung untuk melindungi kepentingan mereka terkait RUU Pertembakauan

Walaupun saluran-saluran penyampaian aspirasi bagi kelompok kepentingan sudah sangat jelas, tetapi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak semua kegiatan ataupun aspirasi dapat tersalurkan dengan baik dan dijalankan secara efektif. Hal ini akan bergantung dari banyak faktor baik internal maupun eksternal dari kelompok kepentingan tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kelompok kepentingan antara lain:⁶

- a. Kemampuan untuk mengerahkan dukungan, tenaga, dan sumberdaya dari anggotanya
- b. Luasnya sumberdaya yang dimilikinya, seperti kemampuan finansial, jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan organisasi dan prestisenya di mata masyarakat umum atau para pembuat keputusan pemerintahan.
- c. Sifat dari issue dan kebijaksanaan pemerintahan pada waktu tertentu.
- d. Otonomi dan kebebasan kelompok kepentingan. Tidak adanya kebebasan bagi kelompok kepentingan untuk menyatakan kepentingan

⁶Riza Noer Arfani, 1996. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., hlm. 60-61

bisa berakibat munculnya ledakan tindakan kekerasan di kalangan masyarakat.

Seperti dalam kegiatan atau cara yang dilakukan APTI Temanggung, kalau di lihat dari kemampuan untuk mengerahkan dukungan tenaga, dan sumber daya, mereka cukup berhasil memobilisasi massa petani untuk bersama sama menyampaikan aspirasi mereka untuk di dengar dan di respon, mereka secara berkala melakukan kunjungan dan pertemuan ke jakarta untuk bertemu dan berdiskusi dengan anggota DPR, tidak sampai di situ mereka juga bersama sama APTI dari kabupaten di Jawa Tengah, melakukan aksi di Kota Semarang, dan akhirnya bisa bertemu dengan Gubernur Ganjar Pranowo.

Lalu jika dilihat dari luasnya sumberdaya yang dimilikinya, seperti kemampuan finansial, jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan organisasi dan prestisenya di mata masyarakat umum atau para pembuat keputusan pemerintahan. Anggota APTI selama ini melakukan aksi menyampaikan aspirasi berdasarkan dari aspirasi dari mereka sendiri tanpa di tumpangi kepentingan dari pihak lain. Seperti dikatakan dalam wawancara kepada Bapak Noer Ahsan selaku Sekretaris APTI Temanggung

“...Ada beberapa lobi dengan DPR, melalui beberapa partai politik, karena sangat terbatasnya SDM, karena petani benar benar independen, aksi turun ke jalan yang dilakukan beberapa waktu lau ke ke Semarang untuk menemui Bapak Ganjar...”⁷

⁷ Wawancara dengan Noer Ahsan, Sekretaris APTI Temanggung, , 22 Maret 2017 pukul 11.45 WIB di Desa Losari Temanggung.

Terbatasnya SDM juga menjadi kendala dalam melakukan Aksi menyuarakan aspirasi. Tidak jarang mereka mengeluarkan ongkos sendiri untuk melakukan perjalanan sampai ke Jakarta.

Sementara kalau dilihat dari sifat dari issue dan kebijaksanaan pemerintahan pada waktu ini, dengan adanya banyak impor tembakau dari luar negeri, pemerintah seharusnya memberikan perlindungan hukum dan pola budidaya tembakau, selama ini bibit tembakau unggulan seperti bibit kemloko bisa sampai di negara Cina, harusnya pemerintah memberi perlindungan terhadap hasil bibit unggulan pribumi, supaya tidak “dicuri” oleh pihak asing. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dari para petani, terutama dari petani tembakau.

3.2.3 Faktor penghambat dan pendukung APTI Temanggung dalam memperjuangkan kepentingan Petani Tembakau

Kesejahteraan adalah sesuatu yang dapat diusahakan tetapi juga bukan berarti menjadi hal yang mudah untuk didapatkan. Seringkali dalam hal pencapaian kesejahteraan timbul masalah-masalah baik dari individu/kelompok tersebut maupun dari faktor eksternal seperti lain. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi penghambat terwujudnya sebuah kesejahteraan sosial.

Dalam usaha APTI Temanggung untuk melakukan peningkatan kesejahteraan petani tembakau juga tak lepas dari beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

1. Banyaknya petani tembakau di Temanggung dan luasnya area sentra pertembakauan di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 14

Kecamatan menyebabkan belum dapat meratanya implementasi program-program APTI Temanggung yang sebenarnya ditujukan dan seharusnya dapat dinikmati oleh seluruh petani tembakau di Kabupaten Temanggung.

2. Minimnya pendanaan yang dimiliki APTI Temanggung sehingga akan berpengaruh pada kuantitas dan pelayanan untuk implementasi program-program kesejahteraan petani. Selama ini untuk membiayai semua aktivitas kegiatan APTI Temanggung menggunakan dana swadaya masing-masing pengurus ataupun dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.
3. Sulitnya mengubah pola pikir petani tembakau agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai apapun suatu program yang dilaksanakan APTI Temanggung, ketika daya penerimaan dan keterbukaan pola pikir dari petani masih rendah akan menyebabkan kurangnya manfaat yang akan diterima petani tersebut. Di Kabupaten Temanggung, masih banyak petani tembakau yang tetap mempertahankan pola tanam sesuai apa yang diajarkan secara turun-temurun sehingga tidak semua petani tembakau dapat menerapkan program-program yang telah dirumuskan APTI Temanggung.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus APTI Temanggung yang benar-benar memiliki kemauan dan kemampuan untuk benar-benar fokus menjalankan program-program APTI Temanggung secara menyeluruh menyebabkan belum meratanya

program ke semua wilayah sentra pertembakauan di Kabupaten Temanggung. Di setiap sentra memang ada PAC yang bertugas mengawasi petani tembakau di wilayahnya masing-masing, tapi beberapa di antara mereka kurang aktif dan tanggap untuk melihat lebih dalam mengenai masalah yang dihadapi petani sehingga terkadang program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi daerah.

5. Kurangnya komunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang menyebabkan kurangnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pertembakauan. Minimnya koordinasi ini juga yang kemudian mengakibatkan kurang harmonisan hubungan antara APTI Temanggung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

3.3 Hubungan APTI Temanggung dengan Pemerintah

Tugas menyejahterakan petani tembakau adalah tugas semua pihak. Banyak pihak yang terlibat dalam tugas ini seperti pemerintah, perusahaan, kelompok-kelompok masyarakat, dan juga organisasi-organisasi lain. Instansi yang mempunyai tugas yang paling pokok untuk menyejahterakan petani tembakau adalah pada pemerintah karena memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat termasuk di dalamnya adalah petani tembakau.

Dalam hal menyejahterakan petani tembakau, Pemerintah juga tak bisa melakukan tugas ini sendiri. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memudahkan pencapaian kesejahteraan petani. Salah satu cara

yang dapat dilakukan adalah dengan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat di wilayah itu. Hal ini perlu dilakukan mengingat kelompok-kelompok masyarakat ini akan lebih mengetahui mengenai fakta-fakta yang terjadi di lini bawah masyarakat.

Konsep itulah yang coba dilakukan oleh APTI Temanggung. APTI Temanggung selalu berusaha menjadi mitra dalam melaksanakan program-program yang menjadi kebijakan dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah. APTI Temanggung berusaha untuk selalu dapat menjadi fasilitator antara petani tembakau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

3.4 APTI Temanggung dan Kesejahteraan Petani Tembakau

Kehidupan sejahtera di Indonesia tercermin pada pasal 27 ayat 2 yang isinya “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal di atas menunjukkan akan hasrat bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang benar-benar layak didapatkan oleh semua warga negara Indonesia.

Konsep kesejahteraan yang dianut tiap individu memang akan berbeda-beda sesuai dengan persepsinya masing-masing. Bagi petani tembakau, konsep sejahtera mengandung makna yang cukup sederhana. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, petani tembakau akan merasa sejahtera apabila dirinya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga kebutuhan sosial kemasyarakatan.

Dengan program-program yang dilakukan APTI Temanggung, secara langsung memang berpengaruh pada peningkatan kualitas baik kualitas hidup maupun kualitas pendapatan petani tembakau. Program-program APTI Temanggung yang membantu petani tembakau baik dari segi permodalan, peningkatan kualitas bahan baku, penyediaan bibit, dll berhasil memudahkan petani untuk lebih efektif dalam proses pertembakauan.

Program-program kemitraan itu paling tidak akan lebih memudahkan petani tembakau untuk mendapatkan hal-hal yang dibutuhkannya dalam proses pertembakauan. Jika proses awal dapat dilalui dengan baik, maka hal ini akan berimbas pada kualitas hasil tembakau yang dihasilkan petani. Apabila hasil tembakau bagus, maka hal ini akan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima petani tembakau. Dengan pendapatan yang bagus maka akan lebih memudahkan petani untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Apabila petani tembakau telah mampu memenuhi kebutuhan hidup, mereka sudah akan merasa dirinya sejahtera. Di sini dapat terlihat bahwa program yang baik akan berimbas juga pada kesejahteraan petani tembakau itu sendiri.

Jika dilihat secara fisik, kesejahteraan petani tembakau memang tidak bisa disamaratakan. Petani tembakau di Kabupaten Temanggung memang bermacam-macam, ada yang memiliki area lahan yang luas, ada yang memiliki area lahan yang sempit, dan ada pula yang hanya berprofesi sebagai buruh petani tembakau. Petani tembakau yang area tanamannya sedikit pasti tingkat kesejahteraannya juga akan biasa-biasa saja. Tapi jika

kita melihat petani tembakau yang area lahannya luas, pasti tingkat kesejahteraannya juga bagus. Tapi jika melihat kondisi nyata tingkat kepemilikan tanah itu bisa dikatakan menengah/standar.

Ketika kita melihat kesejahteraan petani tembakau secara luas, pendapatan petani tembakau sudah sangat berkecukupan bahkan mampu melebihi UMK (Upah Minimum Karyawan) Kabupaten Temanggung. Pendapatan petani tembakau seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bisa mencapai puluhan bahkan jutaan rupiah setiap musimnya. Untuk buruh petani tembakau sendiri, dengan pendapatan sebesar Rp 35.000,00 per hari, penghasilannya tetap mampu melebihi UMK Kabupaten Temanggung sebesar Rp 760.000,00 tiap bulan.

Kesejahteraan memang tak selalu diukur dengan materi. Tingkat sejahtera bagi tiap petani tembakau juga pasti akan berbeda-beda. Dengan program-program yang dilaksanakan APTI Temanggung diharapkan dapat mendorong petani tembakau untuk mau berusaha meningkatkan kualitas dirinya untuk mampu mengelola pertembakauan dengan cara yang lebih teratur dan modern sehingga mampu berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan bagi petani dan keluarga petani tembakau.